

**(PARTISIPASI LEMBAGA UNIT EKONOMI DESA – SIMPAN PINJAM (UED – SP)
KAYU BEIMBAI DESA TELUK BUNIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT)**

Oleh :Saban

Email : mya.samy@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing : Dra. Risdayani, M.Si

Jurusan Ilmu Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Institutions of economic unit village savings and loans (EUD – SP) beimbai timber bay village districts bunian pelangeran kabupaten Indragiri downstream are microfinance institutions (MFIS) which is in the form of the village / village though consensus to manage the funds of rural enterprises (DUD) and funds derived of the activities of savings and loan society beimbai wood bunian.ada bay village was doing agency business in the economic unit village savings and loans (UED – SP) beimbai timber bay village bunian is managing the funds of rural enterprises and lending money to people who do business either individually economy or even in groups.

as an institutions – based community empowerment such as savings and loan institution economy unit village / village savings and loans (UED – SP) paddle beimbai bay village bunian become a frontline in helping economic enterprise communities for more admanced and independentin achieving welfare, also has the function to economic empowerment of the poor so that they com out for the vicious circle of poverty.

Based on the phenomenon and the writer’s observation regarding the institutions of economic unit village savings and loans (UED – SP) beimbai wood bunian bay village has a strategic role in assisting the process of economic improvement masyarakat.melalui economic empowerment in order to achieve the goal of making the community development seutuhnya.and achieve the ideals bunian bay village districts downstream pelangeran Indragiri districts in improving the welfare of society.

Keywords: Institutions savings and loans helping economic

*(PARTISIPASI LEMBAGA UNIT EKONOMI DESA – SIMPAN PINJAM (UED – SP) KAYU
BEIMBAI DESA TELUK BUNIAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT)*

ABSTRAK

Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangeran Kabupaten Indragiri Hilir adalah lembaga keuangan mikro (LKM). Yang di bentuk oleh Desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelolah Dana Usaha Desa (DUD) dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian. Adapun usaha yang dilakukan Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian adalah mengelolah dana usaha desa dan meminjamkan uang kepada semua masyarakat yang melakukan usaha ekonomi baik secara perorangan atau secara kelompok.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam seperti Lembaga Unit Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena dan pengamatan penulis mengenai Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian mempunyai peran strategis dalam membantu proses peningkatan ekonomi masyarakat. Melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan menjadikan masyarakat seutuhnya. Dan mencapai cita-cita Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangeran Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keywords: Partisipasi simpan pinjam pemberdayaan ekonomi

1.1. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, baik pada tatanan sosial, ekonomi maupun budaya, namun demikian hasil kegiatan pembangunan belum dapat menghilangkan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Kemiskinan ini pada dasarnya dipicu oleh rendahnya produktivitas kegiatan masyarakat dengan penyebab kemiskinan

yang kompleks dimulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat tidak berkembang, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengakses permodalan, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, penyebab lainnya seperti penguasaan lahan dan ekonomi yang begitu besar oleh beberapa perusahaan serta infrastruktur akses jalan dan pasar yang menyebabkan masyarakat menjadi hidup terpinggirkan dan sulit melakukan kegiatan ekonomi.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi penting setelah reformasi di Indonesia bergulir serta membawa implikasi bagi bergesernya

paradigma pembangunan yang pada masa awalnya memandang kegiatan produksi sebagai bagian terpenting dalam pembangunan menjadi sebuah paradigma baru yang memandang pentingnya masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan.

Pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan menunjukkan perubahan paradigma pembangunan dari pendekatan pertumbuhan (*growth approach*) kepada pendekatan kemandirian (*self-reliance approach*). Namun demikian, akibat telah termajinalisasi dalam waktu yang lama, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengartikulasikan otonominya sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan dalam strategi pengembangan masyarakat (Adi, 2001).

Untuk pengentasan kemiskinan, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial RI sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pendekatan kelompok yang disebut sebagai kelompok-kelompok usaha. Pendekatan kelompok melalui kelompok usaha merupakan strategi pemberdayaan yang efektif untuk masyarakat lapisan bawah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sumardjo, 2007) yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok akan memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya, karena dapat dipakai untuk meningkatkan kemampuan berusaha, mengembangkan pengetahuan dan sistem nilai yang mendukung kehidupan usaha, menyebarkan moralitas usaha yang baik, dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih luas seperti usaha, kerumahtanggaan kemasyarakatan dan sebagainya.

Pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat, sebagai salah satu usaha penanggulangan

kemiskinan. Wujud kegiatan ini adalah pengembangan Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Kegiatan ini merupakan program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui bantuan dan jaminan sosial dengan melibatkan pendampingan sosial. Pendamping sosial merupakan agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi keluarga miskin yang disebabkan oleh lemahnya kondisi sumberdaya manusia untuk mengakses sumberdaya ekonomi dan sosial (Edi Suharto, 2005). Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan penanggulangan kemiskinan melalui program pengentasan K2I (pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur), melalui kegiatan peningkatan sumberdaya manusia, seperti peningkatan pendidikan, pengurangan masyarakat miskin dan perbaikan infrastruktur. Khusus untuk penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan sejumlah program melalui bantuan Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP). Selain itu untuk pelaksanaan program K2I pemerintah juga membuat program kegiatan seperti pembangunan kebun rakyat, redistribusi asset melalui sertifikasi tanah rakyat, pembangunan rumah layak huni, pembangunan infrastruktur perdesaan dan lainnya melalui satuan kerja yang ada. Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan seperti indentifikasi potensi masyarakat miskin di Riau, membentuk komite penanggulangan kemiskinan tingkat Provinsi.

Lembaga pemberdayaan masyarakat adalah salah satu aspek yang berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat, mengajak, membimbing dan membantu masyarakat dalam usaha dan kehidupannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, bermartabat, mandiri dan sejahtera. Lembaga pemberdayaan masyarakat

mempunyai peran yang strategis untuk membantu dan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk menjadi lebih maju dari keadaan yang sebelumnya, sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut menjadi mandiri dan kreatif.

Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangeran Kabupaten Indragiri Hilir adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang di bentuk oleh Desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelolah Dana Usaha Desa (DUD) dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian. Adapun usaha yang dilakukan Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian adalah mengelolah dana usaha desa dan meminjamkan uang kepada semua masyarakat yang melakukan usaha ekonomi baik secara perorangan atau secara kelompok.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam seperti Lembaga Unit Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Berdasarkan fenomena dan pengamatan penulis mengenai Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian mempunyai peran strategis dalam membantu proses peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan menjadikan masyarakat seutuhnya dan mencapai cita-cita Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangeran Kabupaten Indragiri

Hilir dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Dari fenomena yang terlihat diatas maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja kegiatan Lembaga Unit Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai dalam pemberdayaan masyarakat ?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan Lembaga Unit Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai dalam mengembangkan perekonomian masyarakat ?

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau fakta dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui bahasa.

Pembahasan

Pembangunan di suatu daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi memerlukan peran serta aktif masyarakat, baik berupa pemikiran maupun material. Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan melalui perkembangan usaha ekonomi yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Perkembangan usaha ekonomi melalui UPPKS, P3EL, UED-SP dan BUMDES dapat dilihat dari jumlah kelompok usaha dengan kategori dasar lebih

besar dari pada kategori berkembang maupun mandiri sehingga masih diperlukan pembinaan, motivasi maupun dukungan agar usaha yang dilakukan semakin bertambah maju sebagai upaya menambah ekonomi keluarga.

Tingginya angka perkembangan usaha ekonomi dalam kategori dasar ini memicu pembinaan serta peran aktif semua pihak untuk terus ikut serta dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat peran usaha kecil dan menengah merupakan suatu yang sangat penting bagi keberlangsungan perekonomian.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat dimasukkan ke dalam beberapa permasalahan utama sebagai berikut :

- 1) Masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat pedesaan karena terbatasnya akses masyarakat pedesaan, terutama kaum perempuan, ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar;
- 2) Masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman pedesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain;
- 3) Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan pedesaan;
- 4) Masih kurangnya keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan pedesaan yang mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan

ekonomi dan kesenjangan pelayanan infrastruktur antar wilayah.

Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian merupakan salah satu bentuk kelembagaan di pedesaan yang mengambil langkah besar berperan dalam meningkatkan perekonomian Desa Teluk Bunian. Eksistensi dan keberlangsungan Lembaga Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian ini perlu diperhatikan agar terus berkembang mengikuti perekonomian nasional yang juga terus meningkat.

1. Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai dalam bentuk usaha pemberdayaan masyarakat, khususnya di Desa Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangeran Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan tentang Lembaga Unit Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) melalui pemberdayaan dan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat agar dapat

1.5. Konsep Operasional

1. Pemberdayaan masyarakat adalah bentuk pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan masyarakat

- melalui program unit ekonomi simpan pinjam.
2. Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat melalui unit ekonomi simpan-pinjam.
 3. Modal Sosial adalah kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga unit ekonomi simpan-pinjam dalam menyejahterakan masyarakat.

1.6.kerangka Pemikiran

Sampai saat ini Provinsi Riau telah ditetapkan secara nasional sebagai provinsi percontohan dalam pengelolaan BUMDes. Hal ini tidak lain karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sejarah BUMDes di Provinsi Riau tidak terlepas dari keberadaan Program Pemberdayaan Desa (PPD). Pemerintah Provinsi sejak tahun 2007 sampai dengan 2011 memiliki Program Pemberdayaan Desa (PPD) di 16 (enam belas) kabupaten kota. Melalui program tersebut provinsi memberikan bantuan modal kepada 2 (dua) desa di masing-masing kabupaten/kota sebesar Rp. 500.000.000 per desa disertai penyediaan pendamping desa. Bantuan modal tersebut digunakan untuk membentuk dan mengelola UED-SP (Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam).

Untuk pelaksanaan program tersebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten membuat MoU (Memorandum of Understanding). Pemerintah Kabupaten menentukan nama desa yang akan mendapatkan bantuan. Gaji tenaga pendamping diberikan oleh Pemerintah Provinsi. Adapun untuk Kantor, Sarana dan Prasarana (termasuk Alat Tulis Kantor) disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka pembentukan UED-SP ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyiapan masyarakat;
2. Rapat desa untuk memilih nama UED-SP dan memilih pengurus

(Ketua, Tata Usaha, Kasir, dan staf analisis kredit);

3. Hasil rapat desa ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
4. Para pengurus terpilih mendapatkan pelatihan di provinsi (selama dua minggu).

UED-SP ini mendapatkan pembinaan selama 3 (tiga) tahun, jika memenuhi syarat, Pemerintah Desa dapat mengajukan untuk meningkatkan status UED-SP menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kalau sudah menjadi BUMDes, pembinaan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten.

Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang di bentuk oleh Desa/kelurahan melalui musyawarah untuk mengelolah Dana Usaha Desa (DUD) dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian. Adapun usaha yang dilakukan Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian adalah mengelolah dana usaha desa dan meminjamkan uang kepada semua masyarakat yang melakukan usaha ekonomi baik secara perorangan atau secara kelompok.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang berbasis simpan pinjam seperti Lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian menjadi sebuah garda terdepan dalam membantu usaha ekonomi masyarakat untuk lebih maju dan mandiri dalam mencapai kesejahteraan hidup, juga mempunyai fungsi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin agar mereka keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

4.2.Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkan Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.

VISI :

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dan amanat pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah menjadikan "INDRAGIRI HILIR BERJAYA DAN GEMILANG TAHUN 2025"

Keberhasilan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengembangkan wilayahnya yang memiliki kekhasan sebagai wilayah pasang surut dan bergambut, menjadi sebuah wilayah yang telah berkembang, maju, dan terbuka adalah merupakan bukti bahwa di wilayah lahan marginal telah dapat diwujudkan suatu kehidupan yang menjadikan bagi masa depan daerah dan masyarakat yang setara dengan daerah-daerah lainnya yang sifat lahan wilayahnya jauh lebih berpotensi.

Tingkat kemajuan yang akan dicapai oleh Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur dengan menggunakan ukuran-ukuran yang lazim digunakan dalam melihat tingkat kemakmuran yang tercermin dari pada tingkat pendapatan dan distribusinya dalam masyarakat. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat dan semakin meratanya distribusinya pendapatan tersebut dalam masyarakat, maka akan semakin maju tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Demikian pula dari sisi mutu sumberdaya manusianya dengan menggunakan indikator sosial budaya yang dapat dilihat dari tingkat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin melalui tingkat

pendidikan masyarakat terendah, dan budaya masyarakat, sedangkan untuk derajat kesehatan masyarakat dilihat dari angka harapan hidup yang semakin panjang.

Disamping indikator - indikator ekonomi dan sosial budaya tersebut, juga indikator politik, hukum, keamanan dan ketertiban adalah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dapat dijadikan indikator dalam mengukur kemajuan daerah.

Suatu kemajuan yang hebat (GEMILANG) akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergi, sistematis dan konseptual antara kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

MISI :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut :

Mewujudkan daya saing daerah : adalah memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan keunggulan daerah, meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainable) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan tetap memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses secara merata.

Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis : adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan konsitusi negara dalam koridor NKRI, semakin

mantapnya kelembagaan politik, masyarakat dan kebudayaan, semakin dinamisnya komunikasi dan interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin berkembangnya dengan mantap dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, serta tidak diskriminasi.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya : adalah agar seluruh wilayah Kabupaten Indragiri hilir dan seluruh kelompok masyarakat dapat berkembang, maju dan sejahtera secara bersama-sama tanpa ada yang tertinggal ataupun ditinggalkan, keberpihakan pembangunan kepada kelompok rentan harus menjadi prioritas, berkembangnya aksesibilitas di seluruh wilayah, dan menjangkau ke seluruh wilayah dan kelompok masyarakat, serta hilangnya diskriminasi termasuk gender.

Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral beretika dan berbudaya : adalah dengan menciptakan keadaan kondusif yang pada berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan politik sebagai daerah yang pada awalnya memiliki tingkat heterogenitas namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara bersama yakni melayu maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat tegional nasional dan internasional : adalah merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

sistem kenegaraan dan sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran regional nasional dan internasional sehingga perlu semakin dimantapkan infentitas dan integrasi yang dapat menjadikan kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat indragiri hilir, mendorong meningkatkan dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan internasional.

4.2.1. Letak Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan perairan 7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki "Negeri Seribu Parit" yang sekarang terkenal dengan julukan "NEGERI SERIBU JEMBATAN" dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

0 36´	Lintang Utara
1 07´	Lintang Selatan
104 10´	Bujur Timur
102 30´	Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.

Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang berhulu di pengunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

3.2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan suatu istilah yang menunjuk pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan unit untuk satuan kasus yang diteliti. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah anggota aktif Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai. Adapun teknik pengambilan subyek pada penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu peneliti telah menentukan subyek penelitian berdasarkan karakteristik yang diinginkan oleh peneliti yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun jumlah subyek penelitian yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut

1. Anggota aktif Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai lebih dari 5 tahun keatas.
2. Masyarakat atau anggota aktif yang berhasil dalam memanfaatkan Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) Kayu Beimbai dalam upaya pengembangan perekonomian.

5.1.3. Faktor-Faktor Mempengaruhi Program Pemberdayaan, UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah program, semakin berkualitas sumber daya manusianya semakin tercapai tujuan dari program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan UED-SP ini diperlukan pengelola yang mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, pengalaman sesuai pekerjaan yang dilaksanakan, tanpa sumber daya manusia yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu sumber daya yang dimaksudkan mencakup :

- a. Jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai,
- b. Wewenang atau kewenangan dan
- c. Fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan

dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan sebuah program dan pengembangan program, sumber daya manusia mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan program, begitu pula dengan program UED-SP. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi yaitu yang berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh pengelola ataupun pemanfaat. Berikut adalah wawancara peneliti tentang SDM yang dimiliki oleh pengelola:

“Di UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian ini jumlah staffnya terdiri dari satu orang ketua, satu orang kasir yang juga staff analisis kredit. Dimana ketua tamatan D3, saya sendiri kasir/staf analisis kredit tamatan D3 ekonomi dan TU tamatan SMA kejuruan. Dalam menjalankan tugas saya mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada pemanfaat berdasarkan hasil verifikasi proposal usaha dan adanya agunan. Kami sebagai pengelola baru kali ini mengelola program seperti ini yang membutuhkan kemampuan dan keahlian untuk mengelola keuangan. Pelatihan yang diikuti pengelola hanya sekali pada awal berdirinya lembaga, setelah itu tidak ada”. (Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian, 26 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan pengelola sudah cukup memadai tetapi disini pengalaman dan keahlian pengelolaan tentang keuangan UED-SP secara keahlian hanya dimiliki oleh staf analisis kredit. Pengelola lainnya tidak memadai dikarenakan pendidikannya bukan mengenai keuangan atau ekonomi, ditambah kurangnya pelatihan tentang keuangan yang diikuti pengelola, maka dari itu peran dan fungsi pengelola secara keseluruhan kurang optimal.

Sumber daya pemanfaat dinilai dari mampu atau tidaknya pemanfaat dalam mengelola dana UED-SP yang telah diberikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Tingkat pendidikan dan pengalaman mempengaruhi kemampuan pemanfaat dalam mengembangkan usahanya sehingga usahanya dapat maju dan berkembang sesuai dengan tujuan dari UED-SP. Pengalaman dan kemampuan seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Berikut adalah wawancara dengan salah satu pemanfaat UED-SP yang meminjam dana UED-SP.

“Awalnya Saya hanya sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya tertarik untuk meminjam di UED-SP sebagai tambahan modal dengan rencana usaha membuka warung yang menjual barang harian, pada awalnya usaha saya lancar-lancar saja tetapi uang hasil warung dengan uang kebutuhan sehari-hari saya campurkan, jadi uang warung terpakai juga untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kami”. (Wawancara dengan Saniah salah satu pemanfaat UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian, 23 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa seorang pemanfaat yang ingin berusaha tetapi kurang mempunyai kemampuan dan pengalaman memadai mengenai keuangan, sehingga uang hasil dari warungnya terpakai untuk kebutuhan sehari-harinya, akibatnya usaha tersebut macet. Bagi masyarakat miskin yang pada awalnya sudah mempunyai usaha sudah tentu mereka sudah mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk mengelola usahanya, tetapi bagi masyarakat yang belum mempunyai usaha sebelum meminjam dana UED-SP ini mereka kurang mempunyai kemampuan dan pengalaman tentang hal ini. Sedangkan pengelola hanya memberikan pinjaman dana saja, tidak

disertai dengan pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat yang sebelumnya belum memiliki usaha.

Faktor ekonomi mempengaruhi pemanfaatan dana pinjaman, banyak peminfaat yang menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tujuan dari program tidak tampak dikarenakan dana habis begitu saja. Berikut wawancara dengan salah satu peminfaat UED-SP :

“Saya meminjam di UED-SP sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta Rupiah) yang rencananya akan saya pergunakan untuk mengembangkan usaha bengkel, tetapi pada saat dana sudah diterima saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang diperlukan saat itu, Pada akhirnya saya tidak jadi tambahan modal dalam mengembangkan bengkel karena uangnya sudah saya pergunakan”. (Wawancara dengan Effendi salah satu peminfaat UED-SP, 27 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa peminfaat yang awalnya ingin menggunakan dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya, namun pada saat itu keperluan ekonomi membuat peminfaat menggunakan dana pinjaman UED-SP itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dari pada itu, berdasarkan yang ditemukan dilapangan diketahui tingkat pendapatan peminfaat juga mempengaruhi pemanfaatan dana UED-SP yang diberikan, dimana minimnya pendapatan peminfaat mengakibatkan peminfaat menggunakan dana UED-SP untuk memenuhi kebutuhannya yang lain bukan untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu faktor yang sulit untuk dirubah dalam masyarakat adalah faktor budaya, dimana masyarakat kita biasanya berduyun-duyun untuk mendapatkan dana

pinjaman dari program pemerintah, karena masyarakat beranggapan setiap dana yang disalurkan pemerintah adalah dana hibah dan tidak perlu dikembalikan. Berikut adalah wawancara dengan salah satu peminfaat dana UED-SP.

“UED-SP ini kan program dari pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada kami yang membutuhkan, jadi uang ini kami pergunakan untuk kebutuhan hidup kami. Kalau seandainya kami tidak sanggup mengembalikan dana, ya tidak kami kembalikan, kan ini dananya kan dana pemerintah bearti uang rakyat juga”. (Wawancara dengan Herman salah satu peminfaat UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian, 24 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa masih adanya masyarakat beranggapan bahwa dana UED-SP adalah dana hibah dari pemerintah sehingga peminfaat beranggapan dana UED-SP tersebut tidak perlu dikembalikan. Selain itu, budaya konsumtif yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi pengembalian dan pemanfaatan dana UEDSP yang diberikan. Hal lainnya, beranekaragamnya kultur peminfaat menyulitkan pengelola dalam mengindenfikasi karakter peminfaat sehingga mempengaruhi tingkat pengembalian peminfaat. Masyarakat dapat dianalisa bahwa untuk meningkatkan SDM perlunya pelatihan pada pengelola dan peminfaat mengenai manajemen keuangan dan tujuan UED-SP, sehingga dapat mendorong kesejahteraan atau ekonomi peminfaat.

5.1.3. Dampak Sosial

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah program, semakin berkualitas sumber daya manusianya semakin tercapai tujuan dari program yang dijalankan. Dalam

pelaksanaan UED-SP ini diperlukan pengelola yang mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, pengalaman sesuai pekerjaan yang dilaksanakan, tanpa sumber daya manusia yang memadai implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu sumber daya yang dimaksudkan mencakup :

- A. Jumlah staff pelaksana yang memadai dengan keahlian yang memadai,
- b. Wewenang atau kewenangan dan
- c. Fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan sebuah program dan pengembangan program, sumber daya manusia mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan program, begitu pula dengan program UED-SP. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi yaitu yang berkaitan dengan karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh pengelola ataupun pemanfaat. Berikut adalah wawancara peneliti tentang SDM yang dimiliki oleh pengelola:

“Di UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian ini jumlah staffnya terdiri dari satu orang ketua, satu orang kasir yang juga staff analisis kredit. Dimana ketua tamatan D3, saya sendiri kasir/staf analisis kredit tamatan D3 ekonomi dan TU tamatan SMA kejuruan. Dalam menjalankan tugas saya mempunyai kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada pemanfaat berdasarkan hasil verifikasi proposal usaha dan adanya agunan. Kami sebagai pengelola baru kali ini mengelola program seperti ini yang membutuhkan kemampuan dan keahlian untuk mengelola keuangan. Pelatihan yang diikuti pengelola hanya sekali pada awal berdirinya lembaga, setelah itu tidak ada”. (Wawancara dengan Staf Analisis Kredit UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian, 26 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan

pengelola sudah cukup memadai tetapi disini pengalaman dan keahlian pengelolaan tentang keuangan UED-SP secara keahlian hanya dimiliki oleh staf analisis kredit. Pengelola lainnya tidak memadai dikarenakan pendidikannya bukan mengenai keuangan atau ekonomi, ditambah kurangnya pelatihan tentang keuangan yang diikuti pengelola, maka dari itu peran dan fungsi pengelola secara keseluruhan kurang optimal.

Sumber daya pemanfaat dinilai dari mampu atau tidaknya pemanfaat dalam mengelola dana UED-SP yang telah diberikan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya. Tingkat pendidikan dan pengalaman mempengaruhi kemampuan pemanfaat dalam mengembangkan usahanya sehingga usahanya dapat maju dan berkembang sesuai dengan tujuan dari UED-SP. Pengalaman dan kemampuan seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Berikut adalah wawancara dengan salah satu pemanfaat UED-SP yang meminjam dana UED-SP.

“Awalnya Saya hanya sebagai ibu rumah tangga, kemudian saya tertarik untuk meminjam di UED-SP sebagai tambahan modal dengan rencana usaha membuka warung yang menjual barang harian, pada awalnya usaha saya lancar-lancar saja tetapi uang hasil warung dengan uang kebutuhan sehari-hari saya campurkan, jadi uang warung terpakai juga untuk kebutuhan sehari-hari keluarga kami”. (Wawancara dengan Saniah salah satu pemanfaat UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian, 23 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa seorang pemanfaat yang ingin berusaha tetapi kurang mempunyai kemampuan dan pengalaman memadai mengenai keuangan, sehingga uang hasil dari warungnya terpakai untuk

kebutuhan sehari-harinya, akibatnya usaha tersebut macet. Bagi masyarakat miskin yang pada awalnya sudah mempunyai usaha sudah tentu mereka sudah mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk mengelola usahanya, tetapi bagi masyarakat yang belum mempunyai usaha sebelum meminjam dana UED-SP ini mereka kurang mempunyai kemampuan dan pengalaman tentang hal ini. Sedangkan pengelola hanya memberikan pinjaman dana saja, tidak disertai dengan pelatihan dan pembinaan untuk masyarakat yang sebelumnya belum memiliki usaha.

Faktor ekonomi mempengaruhi pemanfaatan dana pinjaman, banyak pemanfaat yang menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tujuan dari program tidak tampak dikarenakan dana habis begitu saja. Berikut wawancara dengan salah satu pemanfaat UED-SP :

“Saya meminjam di UED-SP sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta Rupiah) yang rencananya akan saya pergunakan untuk mengembangkan usaha bengkel, tetapi pada saat dana sudah diterima saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang diperlukan saat itu, Pada akhirnya saya tidak jadi tambahan modal dalam mengembangkan bengkel karena uangnya sudah saya pergunakan”. (Wawancara dengan Effendi salah satu pemanfaat UED-SP, 27 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui bahwa pemanfaat yang awalnya ingin menggunakan dana pinjaman untuk mengembangkan usahanya, namun pada saat itu keperluan ekonomi membuat pemanfaat menggunakan dana pinjaman UED-SP itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain dari pada itu, berdasarkan yang ditemukan dilapangan diketahui tingkat pendapatan pemanfaat juga mempengaruhi pemanfaatan dana UED-SP yang diberikan,

dimana minimnya pendapatan pemanfaat mengakibatkan pemanfaat menggunakan dana UED-SP untuk memenuhi kebutuhannya yang lain bukan untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu faktor yang sulit untuk dirubah dalam masyarakat adalah faktor budaya, dimana masyarakat kita biasanya berduyun-duyun untuk mendapatkan dana pinjaman dari program pemerintah, karena masyarakat beranggapan setiap dana yang disalurkan pemerintah adalah dana hibah dan tidak perlu dikembalikan. Berikut adalah wawancara dengan salah satu pemanfaat dana UED-SP.

“UED-SP ini kan program dari pemerintah untuk memberikan pinjaman kepada kami yang membutuhkan, jadi uang ini kami pergunakan untuk kebutuhan hidup kami. Kalau seandainya kami tidak sanggup mengembalikan dana, ya tidak kami kembalikan, kan ini dananya kan dana pemerintah bearti uang rakyat juga”. (Wawancara dengan Herman salah satu pemanfaat UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian, 24 Februari 2015).

Dari hasil wawancara dapat digambarkan bahwa masih adanya masyarakat beranggapan bahwa dana UED-SP adalah dana hibah dari pemerintah sehingga pemanfaat beranggapan dana UED-SP tersebut tidak perlu dikembalikan. Selain itu, budaya konsumtif yang ada di masyarakat sangat mempengaruhi pengembalian dan pemanfaatan dana UEDSP yang diberikan. Hal lainnya, beranekaragamnya kultur pemanfaat menyulitkan pengelola dalam mengidentifikasi karakter pemanfaat sehingga mempengaruhi tingkat pengembalian pemanfaat. Masyarakat dapat dianalisa bahwa untuk meningkatkan SDM perlunya pelatihan pada pengelola dan pemanfaat mengenai manajemen keuangan dan tujuan UED-SP, sehingga dapat

mendorong kesejahteraan atau ekonomi pemanfaat.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Keberdayaan lembaga UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian dilihat dari alokasi Dana masih berada pada kategori sedang, dikarenakan masih lemahnya perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian dana sehingga kesesuaian dan ketepatan pengembalian dana ditingkat pemanfaat tergolong cukup besar. Keberdayaan ekonomi pemanfaat setelah mendapat program (UED-SP) dari profil usaha, ketersediaan modal, teknologi dan keuntungan usaha mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian telah mampu memfasilitasi akses modal, teknologi pada kegiatan ekonomi produktif pemanfaat, sehingga mampu memperbaiki proses produksi dengan meningkatnya keuntungan.

lembaga UED-SP mempunyai peran yang signifikan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan adanya lembaga UED-SP sebagai lembaga yang aktif, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

6.2. Saran

Saran yang disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Dalam program pertama yang penulis usulkan yaitu sebagai berikut: Peminjaman Uang Untuk Usaha Kepada Masyarakat, perlu di perhatikan hal-hal berikut:
 - a. Hendaknya menanyakan dengan jelas kegunaan uang tersebut,

jika bukan untuk usaha maka tidak di izinkan. Di khawatirkan hal tersebut menimbulkan hutang yang sulit untuk dibayar, pada akhirnya masyarakat tidak berdaya dalam pemenuhan ekonomi dan tidak menjadi mandiri.

- b. Hendaknya memeriksa terlebih dahulu dengan jelas barang yang menjadi jaminan seperti (sertifikat tanah selaian tanah tempat berdiri rumah, surat-surat kendaraan yang masih bagus dan jelas kepunyaannya, dan barang lainnya yang di anggap bisa dan jelas). Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan rasa kepedulian dalam penyitaan barang.
 - c. Hendaknya besar pinjaman sebesar harga barang yang menjadi jaminan atau tidak melebihi dua kali lipat dari besar barang yang menjadi jaminannya.
2. Lembaga UED-SP Kayu Beimbai Desa Teluk Bunian Kecamatan Pelangeran Kabupaten Indragiri Hilir sebagai perencana dan masyarakat sebagai pelaksana harus mengetahui konsep dalam pemberdayaan ekonomi desa, selama ini perencana dan pelaksana hanya mengetahui pemberdayaan adalah kemauan masyarakat untuk mendukung secara mutlak program-program yang dibuat oleh perencana dengan segala tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, "Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas : Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan

- Praktis*”, Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.
- Ambar Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Gava Media Cetakan Pertama.
- Bagong Suyanto, 2004, *Perangkap Kemiskinan "Problem dan Strategi Pengentasannya"*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Edi, Suharto, 2005, *Pendekatan Pekerjaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsep, Indikator dan Strategi*, Malang.
- Edi Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama.
- Hikmat, Harry, 2004, *Strategi Pembangunan Masyarakat*, Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kartasmita, 2005, *Pengembangan Untuk Rakyat*, Jakarta : Cides.
- Kusnaedi, 1995, *Membangun Desa, Pedoman Untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN dan Kader Pembangunan Desa*, Jakarta : Penebar Swadaya.
- Koho Riwu. J, 1990, *Ilmu Sosial Dasar*, Yogyakarta : Usaha Nasional.
- Kolopaking Lala M. dan Tonny Fredian, 2007, *"Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Pembangunan"*, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Loekman Soetrisno, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta : Kanisius.
- Marliyantoro, 2002, *Dimensi-dimensi Masalah Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : APMD Press.
- Nasdian, Tonny Fredian dan Bambang Sulistyoto Utomo, 2005, *"Pengembangan Kelembagaan Modal Sosial"*, Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Institut Pertanian Bogor.
- Parsudi Suparlan, 1989, *Kemiskinan Dipertanyaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Raharjo, 2004, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sumardjo dan Saharuddin, 2007, *"Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat"*, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Sumardi, 2001, *"Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok"*, Jakarta : CV. Rajawali.